

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Mengenai Peran**

Peran adalah kata kerja yang merupakan kata dasar dari kata “peranan”. Dalam terminology Ilmu Sosial kata ini diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat atau dengan kata lain dapat disebut sebagai bentuk operasional dari kedudukan didalam masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:751)

Menurut Soleman B. Taneko (1986:23), yang dimaksud dengan peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan atau organisasi, berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan dalam sebuah masyarakat.

Menurut Sugiyono (2002:72), peranan lembaga mencakup sumber daya berupa pengadaan dan pengelolaan masukan-masukan keuangan yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan lembaga.

Sedangkan menurut John Stuart Mill (David. E. Apter, 1996:143), bahwa peranan lembaga meliputi 2 hal yaitu :

1. Kekuasaan yang bersifat swasta, digunakan bersama-sama dan karenanya saling menguntungkan bagi penguasa maupun rakyat. Oleh karenanya ada kerjasama antar pihak-pihak guna mencapai tujuan.
2. Lembaga mempunyai tujuan, bersifat membantu menangani dan membantu sesuatu menjadi moderat, dalam hal ini melalui perencanaan lembaga agar tepat sasaran.

Kusnadi dkk (2002:180-181) menjelaskan bahwa tujuan adalah hal yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang dengan melaksanakan kegiatan program yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuan tersebut dituangkan dalam program yang sesuai dengan prosedur dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini visi dan misi serta pedoman umum organisasi yang diterapkan dalam program kegiatan organisasi.

## **B. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah**

### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pengertian Pemerintah adalah Badan Eksekutif mulai dari Kepala Pemerintahan (Presiden atau Perdana Menteri) beserta pembantunya, Menteri-menteri dan seterusnya. Pengertian di atas merupakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan pihak-pihak lain terutama dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Atas dasar inilah pemerintah membentuk suatu perwakilannya di daerah

yang lebih kita kenal dengan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah

“penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah disini diartikan sebagai Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Seperti diketahui, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pemerintah membagi daerah menjadi tiga bagian, yakni daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ketiga daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain.

Dalam melaksanakan kegiatannya Pemerintah Daerah dibantu oleh Badan Legislatif Daerah yang kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila dan mempunyai kedudukan sejajar menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

## **2. Wewenang Pemerintah Kabupaten**

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 21 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hal :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih Pemimpin Daerah;
3. Mengelola Aparatur Daerah;
4. Mengelola kekayaan Daerah;
5. Memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Daerah mempunyai kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik Luar Negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, meneter dan fiscal nasional dan agama (pasal 9 ayat 1).

Selanjutnya dalam pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah social;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **C. Tinjauan tentang Konflik**

### **1. Pengertian Konflik**

Istilah konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Oleh Ramlan Subakti (1992:149) dikatakan, “konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Teori Paul Conn, “ *Conflict an Decision Making : An introduction to Political Science*”, yang dikutip oleh Ramlan Surbakti (1992:8), bahwa pada dasarnya politik adalah konflik, karena konflik

merupakan gejala yang selalu hadir dalam masyarakat termasuk dalam setiap proses politik. Menurut pandangan ini, ada diantara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berusaha keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama juga mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai.

Menurut K.W. Thomas yang dikutip oleh Stephen P. Robbins (1996:124) dalam bukunya "*Perilaku Organisasi*", berpendapat bahwa konflik merupakan suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera, sesuatu yang diperhatikan pihak pertama.

Sedangkan menurut Arraq Steinberg (1981:71), konflik adalah :

“Suatu proses yang kuat sekali untuk hasil yang diharapkan maupun hasil yang tidak diharapkan. Hasil yang diharapkan termasuk menciptakan gagasan-gagasan baru dan unggul, yang memaksa orang untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dan menguji kemampuannya. Hasil yang tidak diharapkan termasuk mencipatakan jarak antara orang-orang, menumbuhkan rasa curiga, serta membuat mereka terasa dihina dan dikalahkan”.

Konflik oleh Soerjono Soekanto (1984:63) sering diartikan sebagai suatu proses sosial dimana setiap, individu, atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang terkadang disertai ancaman atau kekerasan.

Konflik banyak dipersepsi dan diperlakukan sebagai sebuah sumber bencana. Konflik banyak dipahami sebagai keadaan darurat yang tidak mengancam. Sedapat mungkin dihindari dan dicegah. Berbeda dengan pandangan tersebut, pendekatan kritis terhadap konflik lebih menempatkan konflik sebagai suatu relitas sosial dan merupakan bagian yang dibutuhkan dalam proses perubahan sosial. Konflik secara “anatomis” dipahami tidak hanya memiliki satu warna atau satu dimensi saja. Konflik memiliki banyak warna atau multidimensi Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana (2001:6)

Hal ini tentu saja semakin membenarkan dan memperkuat argumentasi bahwa konflik sesungguhnya tidak bisa dilihat dari hanya satu dimensi, melainkan sebagai kenyataan yang berdimensi banyak. Dimensi lain dari konflik yang jarang diperhatikan adalah “peluang” sekaligus “energi” bagi proses perubahan sosial. Oleh karena konflik merupakan energi (sumberdaya), maka ia senantiasa ada selama yang disebut masyarakat itu ada. Konflik tidak bisa dihilangkan karena akan bertentangan dengan sifat ilmiahnya. Yang bisa dilakukan terhadap konflik hanya memahami, menghadapi, dan mengelolanya. Untuk menghadapi dan mengelola konflik hanya mungkin dilakukan apabila substansi dan ruang-ruang konflik bisa dicermati secara kritis.

## 2. Tahap Konflik

Menurut Handayani (1989:118-119) pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konflik Laten/*Latent Conflict* (tersembunyi)
- b. Konflik Terasakan/*Perceiva Conflict*
- c. Konflik Diwujudkan/*Felt Conflict*
- d. Konflik Teraba/*Manifest Conflict*
- e. Akibat Konflik/*Conflict Atfermath* (2000:10)

Pada tahap-tahap tersebut diatas dapat diuraikan secara berurutan bahwa pertama, konflik merupakan suatu keadaan yang laten (potensial) karena factor individu, organisasi dan individu, organisasi dan lingkungan yang berbeda sehingga menimbulkan banyak perbedaan. Kedua, atas dasar itu individu atau kelompok mengetahui bahwa konflik dapat dirasakan adanya seperti hal pada konflik internal partai ini yang juga dapat dikategorikan sebagai tahap ini, karena pada tahap ini konflik yang muncul cenderung berpengaruh terhadap mekanisme pada supra dan infrastruktur pada partai itu sendiri. Ketiga, mereka merefleksikan melalui perbedaan opini maupun tujuan dan nilai, dan melakukan aksi-aksi oposisi sehingga kesalahpahaman dan tidak ketidaksetujuan terjadi. Maka selanjutnya yang keempat, konflik mulai bergerak dan berangsur-angsur mulai diwujudkan. Apabila terus berlanjut konflik dimanifestasikan dalam bentuk agresi terbuka antara pihak yang berkonflik. Kelima, akibat dari konflik ada yang



menguntungkan dan merugikan, menguntungkan seperti meningkatkan kreatifitas, pertukaran ide, menemukan hal-hal baru, dan dinamisasi. Sedangkan yang merugikan akan meningkatkan rasa ketidakpuasan, stress, pergantian orang/jabatan secara tidak konstitusi, dan performansi menurun.

### **3. Sumber Konflik**

Berdasarkan konsep konflik tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa pengertian konflik lebih banyak kepada perbedaan dan pertentangan kepentingan. Bagaimana konflik-konflik tersebut bisa timbul atau sering terjadi, hal yang menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar, karena konflik sudah tentu memiliki sebab kemunculan seperti pepatah mengatakan tidak ada asap tanpa api, pernyataan tersebut yang kemudian sering dinamakan dengan “sumber konflik”.

Mark dan Snyder sendiri yang dikutip Dennis C. Pirages (1981:75) dalam bukunya “*Stabilitas dan Pengelolaan Konflik*”, menyatakan sumber konflik muncul karena kelangkaan posisi dan sumber-sumber (resources).

Menurut Dennis C. Pirages(1981, ), dalam kaitannya dengan partai politik, konflik internal yang terjadi disebabkan persoalan pembatasan posisi yang dapat diisi. Makin minim posisi yang dapat diisi, maka tingkat persaingan dan perebutan untuk mendapatkan semakin tinggi pula. Akibatnya semakin tajam pula konflik diantara individu atau kelompok untuk merebut dan mempertahankan sumber-sumber

tersebut. Maka, setiap kelompok ataupun organisasi harus diperhatikan, artinya apabila sumber-sumber tersebut tidak seimbang dengan kondisi anggota kelompok maka perkembangan suatu konflik sangatlah besar.

Pendekatan Pembangunan Politik (Lucian W. Pye, dalam Yahya A. Muhaimin, 1988:17), ada tiga penyakit partai-partai politik ini yang menyebabkan sering timbulnya konflik. *Pertama*, mereka terlalu berorientasi pada ideologi, bukan program, yang sangat peka untuk masyarakat majemuk. *Kedua*, mereka hanya mengutamakan kepentingan kelompok dan menggunakan dukungan rakyat untuk melindungi kepentingan tersebut. *Ketiga*, cara pengangkatan pemimpin partai, karena melalui pimpinan pusat dan tidak bertanggungjawab pada pemilih, telah menjadikan partai-partai tidak memandang dirinya sebagai bagian dari sebuah sistem yang telah disepakati bersama, tapi lebih cenderung bertindak sendiri sesuai dengan pandangan dan ideology masing-masing yang sempit.

Berbeda dengan sebelum, Maurice Duverger (1988, ) lebih cenderung melihat “faktor ideologi” sebagai penyebab konflik. Menurutnya “ideologi politik” yang tumbuh dan berkembang dalam suatu organisasi dapat menjadi landasan berfikir dan bergerak suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Oleh karenanya, ideologi politik dapat menjadi penuntun, pendorong, dan pengendali perilaku dan tindakan politik suatu bangsa, partai politik, bahkan individu.

Dapat disimpulkan jika semakin banyak ideologi politik yang mereka anut, semakin tinggi pula peluang untuk berkonflik diantara mereka, bahkan sering terjadinya perbedaan persepsi, ide-ide atau nilai-nilai yang ingin diterapkan kepada pihak lain, yang sering disebut dengan pemaksaan kekuasaan.

#### **4. Manajemen Konflik**

Konflik merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi, jika organisasi ingin terus hidup dan tumbuh, karena konflik itu sendiri tumbuh dari sebuah kedinamisan manusia dan sulit untuk dihindari dalam proses kehidupannya. Maka seni dari manajemen konflik atau seni memimpin dalam situasi dan kondisi konflik sangatlah penting dan merupakan tugas yang paling berat dan paling sukar bagi mereka terutama bagi para pemimpin.

Perlunya dikembangkan seni mengelola konflik atau biasa sering disebut dengan *Manajemen Konflik*. Manajemen Konflik ini dilakukan bertujuan agar konflik yang akan, sedang, dan telah terjadi menjadi konflik yang sulit untuk diselesaikan dan merusak keberlangsungan organisasi, melainkan justru organisasi mampu mengambil pelajaran atau menemukan inovasi baru dari adanya konflik tersebut.

Menurut Kartini Kartono (1998:220), Manajemen Konflik dapat dijalankan dengan cara sebagai berikut :

1. Membuat standar-standar penilaian
2. Menemukan masalah-masalah controversial dan konflik-konflik

3. Menganalisa situasi dan mengadakan evaluasi terhadap konflik
4. Memiliki tindakan-tindakan yang tepat untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan dan kesalahan-kesalahan.

Jika sikap yang berbeda, tujuan atau sasaran individu maupun kelompok yang tidak sama, dan segala macam perbedaanlainnya bisa diperbesar dan diperkuat sehingga menambah semakin kuatnya ketegangan, dan pergesekan atau friksi-friksi dan konflik-konflik dengan sendirinya akan menjadi semakin meruncing. Maka akan menjadi masalah yang cukup penting bagi pemimpin besar maupun kecil untuk menemukan teknik-teknik guna merangsang konflik secara interpersonal atau kelompok, atau bahkan sekaligus mengendalikannya, serta mampu menyelesaikan secara sistematis tanpa menimbulkan banyak korban dan kesusahan terhadap pihak lain.

#### **5. Tentang Resolusi Konflik**

Proses perdamaian merupakan serangkaian tindakan, pertemuan, aktivitas yang diambil oleh kelompok yang berkonflik dan orang di wilayah yang terkena imbasnya untuk menuju penyelesaian secara terbuka serta penerimaan secara social, ekonomi, politik dan akar-akar penyebab konflik yang melahirkan pertempuran. Proses perdamaian yang efektif akan memperhitungkan dan menyentuh tujuh elemen: jender, generasi, politik, militer, ekonomi, budaya, social, nasional, batas-batas kewilayahan dan sumber daya alam. ( Y. Tri Subagya, Resolusi Konflik dan Proses Perdamaian 2006 )

Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas, resolusi adalah sebuah frase untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antarkelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk pengambilan keputusan. resolusi yang dilakukan dalam gagasan abstrak, tidak mempunyai implikasi terhadap konsensus politik praktis akan tetapi tindak lanjut pelaksanaan agenda akan lebih mudah dilakukan dalam memengaruhi resolusi konflik. Resolusi bisa pula berawal hanya merupakan sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lebih besar karena berdasarkan kepentingan (seringkali dengan melalui sebuah fasilitasi) hingga dapat mencapai pada tingkat konvergen keputusan yang akan dikembangkan.

Resolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesepakatan/kompromi kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.

Maurice Duverger (2003:317-318) menyatakan, resolusi pada prinsipnya adalah “membagi kue menjadi dua” dan memberikan separuh kepada setiapnya. Resolusi yang ideal akan membuat keseimbangan antara keuntungan dan pengorbanan dari setiap pihak yang bertikai. Hal ini akan didasarkan pada keadilan pada bentuk (kesamaannya) yang fundamental, yang disimbolkan dalam skala.

Setiap individu, setiap kelompok, setiap kelas, dengan demikian akan terpuaskan, dan alasan-alasannya untuk konflik akan menghilang. Semakin adil syarat-syaratnya, semakin mudah mencari kesepakatan.

Penulis simpulkan bahwa resolusi konflik merupakan suatu cara pengambilan kesepakatan atau kompromi untuk mencari keputusan dari konflik yang didasari prinsip *win-win solution*, dimana kelompok atau individu yang mengalami konflik dapat menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik yang ada. Pada dasarnya dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa resolusi konflik sangat berperan dalam penyelesaian konflik yang ada.

### **1. Model Resolusi**

Upaya untuk memecahkan konflik selalu timbul selama berlangsungnya kehidupan organisasi/kelompok, namun terdapat perbedaan-perbedaan di dalam sifat dan intensitas konflik pada berbagai tahap perkembangan organisasi/kelompok. Resolusi terhadap konflik-konflik yang besar tidak akan dapat terjadi sampai suatu organisasi/kelompok telah berkembang mencapai suatu titik dimana terdapat kesepakatan yang mendasar di dalam organisasi/kelompok terjadi dengan pasti. Tentunya dalam hal ini setiap konflik yang terjadi membutuhkan suatu model resolusi atau kesepakatan bersama dalam pemecahan konflik tersebut.

Wahyu M.S. (1988:162) dalam bukunya menjelaskan tentang model-model resolusi konflik, adapun model-model resolusi tersebut adalah :

1. *Elimination*, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik, yang diungkapkan dengan :
  - a. Kami mengalah;
  - b. Kami mendongkol;
  - c. Kami ke luar;
  - d. Kami membentuk kelompok kami sendiri.
2. *Subjugation* atau *Domination*, artinya orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar dapat memaksa orang atau pihak lain untuk mentaatinya. Tentu saja cara ini bukan suatu cara pemecahan yang memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat.
3. *Majority Rule*, artinya suara terbanyak yang ditentukan dengan voting, akan menentukan keputusan, tanpa mempertimbangkan argumentasi. Pada hakekatnya majority ini merupakan salah satu bentuk dari subjugation.
4. *Minority Consent*, artinya kelompok mayoritas yang menang, namun kelompok minoritas tidak merasa dikalahkan, dan menerima keputusan serta sepakat untuk melakukan kegiatan bersama.
5. *Compromise* (kompromi), artinya kedua atau semua sub kelompok yang terlibat di dalam konflik, berusaha mencari dan mendapatkan jalan tengah
6. *Integration* (integrasi), artinya pendapat-pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan, dan ditelaah kembali sampai tercapainya suatu keputusan yang memuaskan bagi semua pihak. Integrasi merupakan cara pemecahan konflik yang paling dewasa.

Penulis dapat simpulkan bahwa resolusi memiliki model atau cara dalam penyelesaian dan pemecahan konflik yang terjadi, tentunya masing-masing model ini memiliki cara dan tahapan yang berbeda-beda, hal ini menentukan bagaimana individu atau kelompok tersebut dalam menyelesaikan konflik tersebut.

#### **D. Tinjauan Tentang Kebiasaan**

Kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folkways*) adalah perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding cara. Kebiasaan merupakan suatu indikator yang dilakukan seseorang. Misalnya bertutur kata sapa lembut (sopan santun) terhadap orang lain yang lebih tua atau kebiasaan mengucapkan salam setiap bertemu orang lain dan sebagainya (AbdulSyani 56:2008)

#### **E. Tinjauan Tentang Budaya**

Untuk lebih jelas dibawah akan dijelaskan tentang Budaya menurut para ahli :

1. *Herkskovits* dan *Malinowski* memberikan devinisi Budaya adalah sebagai suatu superorganik. Karena budaya yang turun menurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus menerus atau berkesinambungan meskipun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan karena irama kematian dan kelahiran.
2. *E. B Taylor* melihat budaya sebagai kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hokum adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat.
3. *Roucek dan Warren* mendefinisikan budaya sebagai satu cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna



memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya.

4. *Hassan Shadily* budaya berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat kebiasaan dan lainnya.
5. *Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi* mengemukakan bahwa budaya itu adalah semua hasil karya, rasa, cipta masyarakat.
6. *C. Kluckhohn* Budaya merupakan seluruh cara hidup suatu masyarakat.
7. *Koentjaraningrat* mengartikan budaya sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.

#### **F. Tinjauan Tentang Komunikasi**

Komunikasi menurut ahli yaitu R. Loose dan De Vito :

1. Communication means that information is passed from one place to another (Komunikasi adalah informasi yang disampaikan dari suatu tempat ke tempat lain).
2. Komunikasi adalah semua prosedur dimana pikiran seseorang mempengaruhi orang lain.
3. Komunikasi adalah proses atau suatu tindakan menyampaikan pesan dari pengirim kepenerimanya melalui suatu medium yang biasanya mengalami gangguan. Dalam definisi ini, komunikasi harus bersifat sengaja serta membawa perubahan.

## G. Tinjauan Tentang Masyarakat Bali dan Lampung

### 1. Masyarakat Bali

Pendukung kebudayaan Bali adalah masyarakat Bali, yang dikenal sebagai etnik Bali atau orang Bali. Sebagai sebuah etnik, orang Bali memiliki ciri identitas etnik yang melekat pada diri dan kelompoknya. Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2008: 3) mendefinisikan etnik Bali sebagai sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaan, baik kebudayaan lokal Bali maupun kebudayaan nasional. Rasa kesadaran akan kesatuan kebudayaan Bali ini diperkuat oleh adanya kesatuan bahasa, yakni bahasa Bali, agama Hindu, dan kesatuan perjalanan sejarah dan kebudayaannya. Keyakinan terhadap agama Hindu melahirkan berbagai macam tradisi, adat, budaya, kesenian, dan lain sebagainya yang memiliki karakteristik yang khas, yang merupakan perpaduan antara tradisi dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, karakteristik tersebut mewujudkan diri dalam berbagai konsepsi, aktivitas sosial, maupun karya fisik orang Bali (Supatra 2006; Geriya, 2008).

Identitas etnik orang Bali juga tampak pada busana tradisional Bali dan identitas ruang serta lingkungan tempat tinggal (Supatra, 2006: 88-89). Dalam pengertian ruang dan tempat tinggal, persamaan-persamaan yang menjadi ciri identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai *krama desa* (warga desa) dari suatu *desa pakramanan* (desa adat) dengan berbagai aturan yang

mengikatnya, yang termuat dalam *Awig-awig Desa Pakraman* (peraturan tertulis desa adat) (Windia dan Sudantra, 2006; Sirtha, 2005). Disamping hidup sebagai *krama desa* sebuah *desa pakraman*, seluruh masyarakat Bali juga terikat dalam kelompokkelompok kekerabatan yang disebut *dadia*, yang jumlah anggotanya bervariasi dan bertempat tinggal menyebar, tidak selalu pada satu teritorial tertentu. Geertz and Geertz (1975) menyebutkan, bahwa *dadia* merupakan basis atau unit terkecil dari kelompok masyarakat adat di Bali yang terdiri dari beberapa *kuren* (keluarga), dan merupakan bagian dari *desa pakraman*. Mereka terikat oleh kesamaan *wit* (asal) berdasarkan kesamaan leluhur, dan terikat pula oleh suatu tempat persembahyangan bersama, yakni *Pura Dadia* (Windia dan Sudantra, 2006: 71).

Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana*. Falsafah hidup *Tri Hita Karana* sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan sistem pengetahuan, pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya. Pada akhirnya falsafah *Tri Hita Karana* ini menjadi ideologi dan *core values* (inti ajaran)

dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali. Ideologi dan *core values* inilah yang kemudian menjadi landasan bagi standar peraturan yang digunakan institusi-institusi utama, seperti *kuren* dan *dadia, sekaa* (organisasi tradisional), *subak* (organisasi pengairan) dan *desa pakramanan* di Bali, dalam mengevaluasi perilaku anggotanya.

## **2. Masyarakat Lampung**

Sebetulnya, budaya Lampung sejalan dengan agama Islam, sehingga tidak ada alasan untuk membangun image buruk tentang masyarakat Lampung. Kesesuaian dengan nilai-nilai agama itu bisa dilihat dalam hal menerima tamu, yang representasinya para pendatang di Lampung, sehingga Provinsi Lampung lebih dikenal sebagai “Indonesia Mini”. Artinya, keanekaragaman kultural yang ada di Lampung terjadi karena penerimaan masyarakat Lampung terhadap para pendatang.

Sebenarnya masyarakat Lampung sudah biasa menerima pendatang yang dianggap sebagai orang Lampung, asalkan mengikuti hukum adat yang berlaku. Dengan hubungan yang baik antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli --termasuk untuk menumpang berladang di dalam salah satu marga Lampung-- membuat wilayah bersangkutan menjadi berkembang, sehingga menjadi kampung atau sukuh (tuh) baru sebagai bagian dari marga Lampung yang telah ada," (Yoshie Peneliti dari Jepang) Untuk mengenal lebih dekat masyarakat Lampung kita harus mengerti sifat-sifat atau

filsafat masyarakat Ulun lampung, sehingga tidak ada image negatif yang timbul. Kita harus sadar bahwa hidup di lampung, berpenghasilan di lampung, beranak pinak dilampung, adalah menjadi masyarakat lampung yang mempunyai akar kelampungan.

### **Sifat-sifat Orang Lampung Menurut Kitab Kuntara Raja Niti**

1. Pi'il Pesenggikhi Malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri. Segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun kelompok yang senantiasa dipertahan.
2. Sakai Sambaian  
Gotong Royong, Tolong-menolong, bahu membahu, dan saling memberi sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain.
3. Nemui Nyimah  
Saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu. Bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja yang berhubungan dengan dengan masyarakat lampung.
4. Nengah Nyampukh  
Tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan pengetahuan luas.

## 5. Bejuluk Adok

Tata ketentuan pokok yang selalu diikuti dan diwariskan turun temurun dari zaman dahulu. Mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya.

### **Ungkapan Prinsip Orang Lampung dalam Adi-adi (Pantun Lampung)**

Tandani hulun Lampung, wat piil-pusangiri Mulia hina sehitung,  
wat malu rega diri Juluk-adok ram pegung, nemui-nyimah muwari  
Nengah-nyampur mak ngungkung, sakai-sambaian gawi

Dengan senantiasa dilandasi dengan semangat hidup atau dikenal dengan 5 (lima) filosofi/prinsip hidup yaitu : Pi'il Pesenggiri, Bejuluk Beadek, Nemuy Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakay Sembayan, yang merupakan tekad masyarakat Lampung dengan kesadaran bersama sehingga tetap terpelihara kerukunan antar sesama masyarakat yang saling asah, saling asih dan saling asuh.

## H. Tinjauan Tentang Kesbangpol dan Linmas

Menurut Perbup Nomor 31 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Pasal 3 yaitu “Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dan tugas-tugas lainnya yang diberikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati”.

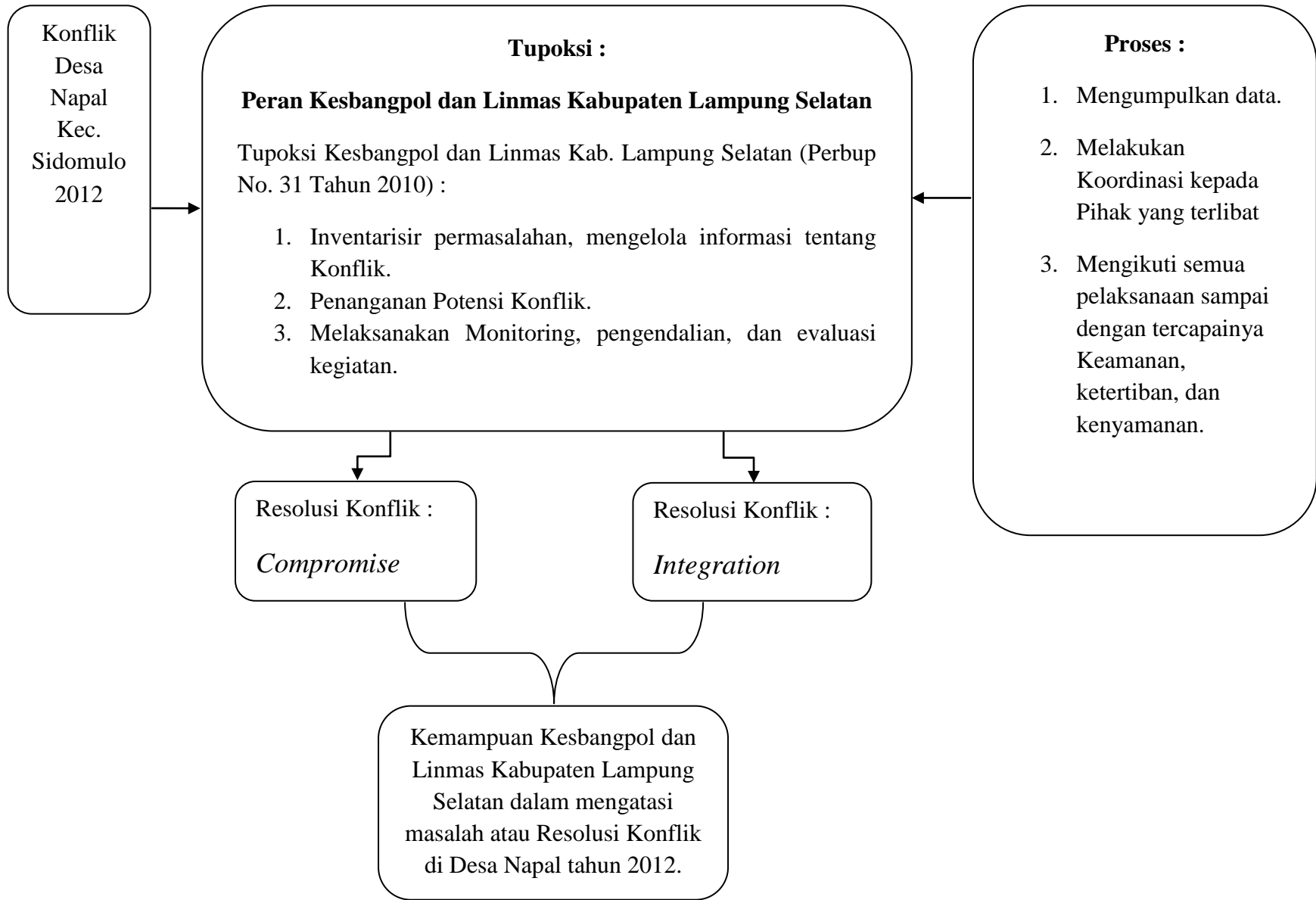
Tugasnya Kesbangpol dan Linmas juga dijelaskan di Perbup No. 31 tahun 2010 yaitu :

1. Mengumpulkan dan mengolah data dan menginformasikan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban;
2. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban ;
3. Mengkaji dan mengevaluasi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban;
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan fasilitas dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.
5. Menganalisa data dan informasi dalam rangka perumusan kebijaksanaan fasilitas dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana dan rehabilitas;
7. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana;
8. Melaksanakan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

## **I. Kerangka Pikir**

Tugas dan Fungsi dari Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satunya memiliki tugas untuk penanganan konflik yang ada di Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Hal yang mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dari Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan Peran Badan yang merupakan wakil dari kepala daerah dalam kasus Konflik yang terjadi di dalam pemerintahan daerah.





Dari Kerangka Pikir diatas maka dijelaskan bahwa bagaimana Peran Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Lampung Selatan menyelesaikan atau *Resolusi Konflik* dari konflik yang terjadi di Desa Napal Kecamatan Sidomulyo. Sebagaimana yang sudah di jelaskan dari Tupoksi Ksbangpol dan Linmas Perbup No. 31 tahun 2010 tentang Tupoksi dari Kesbangpol dan Linmas Kab. Lampung Selatan.

Beberapa cara yang di gunakan dalam *Resolusi Konflik* yaitu *Compromise dan Integration* dapat kita lihat seberapa besar Peran dari Kesbangpol dan Linmas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Napal.

Hal yang dilakukan oleh Kesbangpol dan Linmas sebagai pihak yang mewakili pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik yang ada di daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Sehingga tercapainya keamanan, kenyamanan dan ketertiban yang ada di daerah Lampung Selatan umumnya dan Desa Napal khususnya.